KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bandara Komodo Tidak Akan Dikuasai Asing
Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Bandara Komodo Tidak Akan Dikuasai Asing

JAKARTA – Kekhawatiran Komisi V DPR RI soal pihak asing yang mengelola Bandara Komodo, Nusa Tenggara Barat (NTT), terjawab. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bandara yang terletak di Labuan Bajo itu tak akan dikuasai asing, sebab kepemilikannya 51 persennya harus lokal.



CHARLES/INDOPOS
Budi Karya Sumadi

"Lelang Bandara Komodo komotasi dikuasai asing itu sama sekali tidak benar. Saya hargai pendapat bapak ibu mengenai kehati-hatian. Kami akan hati-hati. Maka, kami minta kepemilikan ini 51 persen lokal. Nyatanya 80 persen itu milik nasional dari Cardig, Changi cuma 20 persen," ungkapnya saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/2).

Sedangkan operator bandara, menurut Budi Karya, akan diberikan kepada perusahaan lokal. Lalu navigasi udaranya tetap dilakukan oleh AirNav. Changi, akan lebih banyak mengembangkan sisi *land side* mulai dari terminal dan gedung-gedung di bandara.

"Operasionalnya BUBU-nya itu lokal. Air navigation itu akan tetap AirNav. Bea cukai tetap aktif dan terakhir imigrasi. Biasanya Changi lebih banyak mengelola yang berkaitan dengan land side atau di gedung. Jadi kalau *air side* dia nggak ikut," urainya.

Menurut Budi, yang paling penting, investasi yang didapatkan dari Changi. Dengan tambahan Rp1 triliun investasi dari swasta saja bisa digunakan untuk tambahan modal pengembangan bandara di tempat lain.

"Jadi kalau kita dapat Rp 1 triliun dari swasta, saya pikir cukup lumayan untuk menambah supaya ruang yang dimiliki oleh APBN bisa membangun bandara-bandara di daerah lain," tuntasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin mempertanyakan dampak dari pengelolaan yang diserahkan kepada asing.

"Asumsi saya bahwa bandara itu pintu gerbang orang asing masuk ke wilayah kita. Kami mendengar Bandara Komodo adalah satu-satunya di situ. Dan akan dikelola oleh pihak ketiga, yaitu dari Changi," ujarnya Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/2). Dia juga bercerita, sempat mengunjungi Labuan Bajo, NTT, beberapa waktu lalu.

Padahal, ia menegaskan, Indonesia sudah punya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang fokus mengelola bandara, antara lain Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II (AP I dan AP II).

"Saya butuh penjelasan. Apa yang mungkin didapat Indonesia dari risiko-risiko negatif? Apakah Angkasa Pura (sudah tidak sanggup lagi mengelola Bandara Komodo?," tanyanya.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Ahmad Syaikhu juga menyayangkan keputusan pengelolaan yang diberikan ke pihak asing. Dia khawatir hal ini bisa mengganggu stabilitas politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM) karena arus barang dan orang bisa tak terkendali.

"Bandara Komodo sungguh sangat disayangkan. Bisa bikin arus barang dan orang nggak terkendali, dan bisa aja ganggu polhukam ini," ungkap Syaikhu.

Politikus PKS itu mengatakan, bila bandara ini dikelola perusahaan nasional jelas akan menguntungkan bagi negara. "Padahal, kalau itu dikelola negara dan perusahaan nasional ini akan menguntungkan untuk Indonesia. Peluang besar bagi kita ini sebenarnya," imbuhnya. (aen)